

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN *FRAUD* PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI KOTA BOGOR

ANALYSIS FACTORS INFLUENCING TENDENCY OF FRAUD THERE IS SET OF JOB PERIPHERAL OF AREA (SKPD) IN TOWN OF BOGOR.

F. Susandra, S. Hartina

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Kode Pos 16720, Telp/Fax : (0251) 8245155
Email : [farizka.susandra.@unida.ac.id](mailto:farizka.susandra@unida.ac.id), Siti.Hartina@unida.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of the opportunity, rationalization, and collusion for the tense of fraud. The population in this study are the department in Bogor City. The sampling method used in this research quota sampling that employees have responsibility to managing finance in the either government. The datas in this research is obtained by distributing questionnaires to 84 respondents on 14 government in Bogor City. For the testing research hypotheses and instrumen using multiple regression. The results of this study prove that: opportunity and collusion had effect on tense of fraud. While rationalization had not effect on tense of fraud.

Key Word : *opportunity, rationalization, collusion, and fraud.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *opportunity, rationalization, dan collusion* terhadap kecenderungan *fraud*. Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas di Kota Bogor. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode quota sampling dengan criteria pegawai yang berada pada subbagian keuangan atau yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan pada masing – masing dinas. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 84 responden di 14 Dinas di Kota Bogor. Pengujian hipotesis dan instrument penelitian menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: *opportunity dan collusion* berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*. Sedangkan *rationalization* tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.

Kata Kunci : *opportunity, rationalization, collusion, dan fraud*

PENDAHULUAN

Tahun 1998 terjadi jenis kejahatan yang sering terjadi dunia. Jenis kejahatan tersebut adalah kejahatan keuangan atau yang lebih dikenal dengan *fraud*. Hampir seluruh masyarakat dunia telah menggolongkan kejahatan tersebut sebagai kejahatan yang sangat luar biasa. Dan pada abad ke 20, *fraud* semakin gencar menjadi pemberitaan media.

Statement of Auditing Standart No. 99 (2002) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit. Salah saji material dalam laporan keuangan akan menyesatkan stakeholder atau pengguna laporan keuangan karena informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut tidak mencerminkan kondisi organisasi yang sebenarnya (Ahriati, Basuki, Widiyastuty, 2015).

Indikasi kecurangan selalu ditemukan dalam berbagai sektor baik sektor publik, maupun sektor sosial korporasi. *Fraud* yang terjadi pada sektor publik membawa dampak yang luas. Hal ini dikarenakan *fraud* yang terjadi pada sektor tersebut mengakibatkan kerugian yang harus diderita masyarakat umum dan bukan hanya diderita oleh sekelompok orang seperti pemegang saham atau donatur. Umumnya kecurangan akuntansi yang sering terjadi yaitu korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Kusumastuti, 2012).

Kasus kecurangan di Indonesia bukan lah hal yang baru. Kasus kecurangan keuangan terjadi pada sektor publik maupun sektor komersial. Krisis ekonomi tahun 1998 dituding sebagai dampak maraknya praktek-praktek *fraud* dalam pemerintahan. Itu pula yang mendorong muncul desakan masyarakat luas untuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparansi, akuntabel dan bebas dari korupsi. Dan di Indonesia, korupsi merupakan istilah asosiasi untuk menggambarkan praktek-praktek *fraud* yang dilakukan oleh pejabat dan aparatur pemerintahan. Meskipun dalam literasi *fraud auditing* korupsi bukan bersifat umum melainkan hanya salah satu dari bentuk *fraud*, namun istilah ini sudah terbakukan secara legal dalam UU No.31 tahun

1999 jo UU No.20 tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Didi, 2015).

Menurut data yang dipublikasikan oleh KPK, Per 31 Agustus 2016, di tahun 2016 ini penanganan tindak pidana korupsi lebih banyak ditemukan di kementerian/lembaga sebanyak 26 perkara, Pemerintah Provinsi sebanyak 13 perkara, DPR dan DPRD sebanyak 11 perkara, dan BUMN/BUMD sebanyak 6 perkara. Beberapa kasus kecurangan yang baru-baru ini terjadi di Indonesia yaitu pertama kasus dugaan korupsi penggelembungan nilai (*mark up*) pembebasan lahan Pasar Jambu Dua, Bogor (06 April 2016). Kejaksaan Negeri Kota Bogor menahan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor Hidayat Yudha Priyatna atas dugaan tersebut. Yudha adalah satu dari tiga orang yang telah ditetapkan tersangka oleh Kejari Bogor dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan seluas 7.302 meter persegi senilai Rp 43,1 miliar tersebut. Yudha ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejari Bogor pada 29 Oktober 2015, lalu dua tersangka lain ditetapkan. Yudha disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (Kompas.com). Yudha Priyatna divonis 4 tahun penjara denda 200 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Jumat 30 September 2016. Dalam putusan yang dibacakan hakim ketua Lince Anapurba disebutkan, korupsi yang dilakukan Hidayat bersama-sama Wali Kota Bogor Bima Arya dan Sekda Ade Sarip Hidayat. Selain Hidayat, dua terdakwa lainnya pada kasus yang sama yakni mantan Camat Tanah Sereal, Irwan Gumelar dan mantan Ketua Tim Appraisal, Roni Nasrun Adnan. Mereka juga divonis 4 tahun penjara plus denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Vonis majelis hakim terhadap ketiga terdakwa lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya JPU dari Kejari Bogor menuntut ketiga terdakwa, masing-masing 6 tahun penjara plus denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan (Pikiranrakyat.com).

Berdasarkan beberapa kasus diatas kecurangan sering terjadi pada dinas pemerintahan. Adanya motivasi seseorang melakukan kecurangan atau *fraud* relatif bermacam-macam. Salah satu teori yang

menjelaskan tentang motivasi seseorang melakukan fraud adalah fraud triangle theory. Fraud triangle terdiri atas tiga komponen yaitu opportunity (kesempatan), pressure (tekanan), dan rationalization (rasionalisasi) yang dikemukakan oleh Donald Cressey (1953). Kesempatan atau *opportunity* merupakan suatu kondisi yang memungkinkan seseorang bisa melakukan kecurangan. Kondisi tersebut sebenarnya dapat dikendalikan oleh perusahaan seperti yang dikemukakan oleh Najahningrum (2013), Zulkarnain (2013). Sifat kesempatan dirasakan bahwa kesempatan tidak harus nyata juga. Namun, peluang yang ada dalam persepsi dan keyakinan dari pelaku. Dalam kebanyakan kasus, semakin rendah resiko tertangkap, semakin besar kemungkinan itu adalah bahwa penipuan akan berlangsung. *Rationalization* terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktivitas yang mengandung kecurangan. Para pelaku *fraud* meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu *fraud* tetapi adalah sesuatu hal yang memang menjadi haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak kepada organisasi, dan menganggap bahwa tindakan tersebut bukanlah tindakan yang tercela seperti yang dikemukakan oleh Najahningrum (2013), Zulkarnain (2013). Selain itu *collusion* memiliki pengaruh langsung terkuat terhadap kecurangan. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Misalnya adanya kesepakatan antaran atasan dengan bawahan untuk melakukan pencurian sejumlah uang, hal ini menyebabkan tingginya potensi untuk terjadinya kecurangan.

Kecurangan (*fraud*) dalam sektor pemerintahan telah terjadi secara vertikal maupun horisontal, yaitu dari struktur pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah kabupaten/kota pada level eksekutif maupun legislatif. Kasus fraud yang sering terjadi di Indonesia adalah korupsi. Apabila kasus-kasus korupsi yang terjadi di pemerintah daerah dilihat berdasarkan sebaran wilayah pulau jawa di Indonesia, dari 5 wilayah yang ada, Provinsi Jawa Barat menduduki urutan ke 2 dengan jumlah kasus

dari tahun 2004–2016 sebanyak 18 kasus (KPK,2016).

Sitorus (2008) dengan judul penelitian "*The Roles Of Collusion, Organisational Orientation, Justice Avoidance, And Rationalisation On Commission Of Fraud: A Model Based Test*". Variabel yang digunakan yaitu organization, *opportunity*, *rationalization*, *justice*, *collusion*, dan *fraud*. Hasil dari penelitian ini yaitu kolusi dianggap sebagai pengaruh langsung terkuat di komisi penipuan dengan Efek yang lebih rendah yang timbul dari kesempatan untuk penipuan dan pengaruh langsung akhir yang timbul dari penghindaran keadilan. Selain itu, orientasi organisasi dianggap untuk memberikan pengaruh tidak langsung lain dikomisi penipuan.

Lou, Wang (2009) dengan judul penelitian "*Fraud Risk Factor Of The Fraud Triangle Assessing The Likelihood Of Fraudulent Financial Reporting*". Variabel yang digunakan merupakan proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi fraud berdasarkan teori *fraud triangle* yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. *Pressure* diproksikan dengan tekanan keuangan dari perusahaan dan tekanan keuangan dari direktur atau supervisor dari perusahaan. *Opportunity* diproksikan dengan jumlah transaksi yang kompleks dalam perusahaan dan pengendalian internal perusahaan. *Rationalization* diproksikan dengan integritas manajemen dan hubungan dengan auditor. Di samping itu penelitian tersebut juga menggunakan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan keuangan yang ditanggung perusahaan, tekanan keuangan yang ditanggung direktur atau supervisor, jumlah transaksi yang kompleks, integritas manajemen, dan hubungan dengan auditor eksternal berkorelasi positif dengan kemungkinan terjadinya kecurangan. Sementara ukuran perusahaan berkorelasi negatif dengan kemungkinan terjadinya kecurangan.

Najahningrum (2013) yang berjudul: "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Kota DIY*". Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada Sub Bagian Keuangan Dinas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini menggunakan tujuh variabel independen dan satu variabel dependen.

Ketujuh variabel independen tersebut terdiri atas: (1) penegakan hukum, (2) keefektifan sistem pengendalian internal, (3) asimetri informasi, (4) keadilan distributif, (5) keadilan prosedural, (6) komitmen organisasi dan (7) budaya organisasi. Sedangkan variabel dependennya yaitu kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Najahningrum (2013) menyatakan bahwa: terdapat pengaruh negatif antara penegakan hukum, keefektifan sistem pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, dan tidak dapat pengaruh antara budaya etis organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Zulkarnain (2013) dengan judul "*Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud pada Dinas Kota Surakarta*". Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada Dinas di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan tujuh variabel independen dan satu variabel dependen. Keenam variabel independen tersebut terdiri atas: (1) keefektifan pengendalian internal, (2) kepuasan kompensasi, (3) kultur organisasi, (4) perilaku tidak etis, (5) gaya kepemimpinan, (6) sistem pengendalian internal, dan (7) penegakan hukum. Adapun variabel dependennya adalah *fraud* dalam Sektor Pemerintahan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian *intern*, kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan, dan sistem pengendalian internal terhadap *frauddi* sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif kepuasan kompensasi terhadap *fraud*, tidak terdapat pengaruh antara kultur organisasi, dan penegakan hukum terhadap *frauddi* sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Fazli, Iskandar, Mohamed (2014) dengan judul penelitian "*Fraud Risk Factors of Fraud Triangle and the Likelihood of Fraud Occurrence: Evidence from Malaysia*". Variabel Proxy diteliti dalam penelitian ini meliputi (1) penjualan untuk piutang (salar) dan (2) *leverage* (LEV) untuk tekanan dan (3) jumlah anggota komite audit (AUDCSIZE) dan (4) jumlah anggota dewan (BRDSIZE) untuk

kesempatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan penipuan terjadinya berhubungan positif dengan penjualan yang lebih untuk memperhitungkan persentase piutang dan lebih maksimal. Disarankan bahwa korelasi antara komite audit dan ukuran papan negatif konsisten dengan studi sebelumnya. Keterbatasan penelitian ini adalah ketidakmampuan untuk mengidentifikasi proxy yang tepat untuk rasionalisasi sebagai SAS No.99 juga mencatat tentang kesulitan yang terkait dengan mengisolasi karakteristik yang digunakan sebagai indikator rasionalisasi.

Fraud merupakan masalah klasik dalam sektor pemerintahan dan bisnis, banyak ragam dan bentuk *fraud* yang terjadi sejak dahulu hingga sekarang, bahkan disadari atau tidak disadari *fraud* terjadi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa audit dan anti *fraud* sekalipun. Pada tahun 2002 Amerika mengeluarkan aturan baru yang dikenal dengan *Sarbanes Oxley Act* (SOA) yang diberlakukan untuk perusahaan yang terdaftar di *New York Stock Exchange* (NYSE) munculnya kasus kecurangan tersebut karena adanya beberapa kasus kecurangan yang terjadi pada beberapa perusahaan yang ter-*listing* di NYSE (Fitrawansyah, 2014:7). Di Indonesia sendiri, maraknya kasus *fraud* menyebabkan pemerintah mengeluarkan beberapa perundang-undangan dan pembentukan komisi *add hoch* anti *fraud*. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan kasus-kasus *fraud* yang secara masif telah mengrogoti keuangan negara. Joyohadikusumo, (Priantara, 2013:11) praktek *fraud* khususnya korupsi setidaknya membawa 8 dampak buruk, seperti:

1. Kualitas pelayanan umum yang rendah,
2. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah berkualitas rendah,
3. Meningkatnya beban rakyat karena ketidakefektifan dan efisiensi pada institusi publik yang menyediakan jasa dan *supply* telekomunikasi, bahan bakar, listrik, dan sebagainya,
4. Meningkatnya kemiskinan dan kesengsaraan rakyat,
5. Timbul ketidakmerataan dan ketidakadilan distribusi ekonomi,
6. Meningkatnya angka kejahatan dan masalah-masalah sosial sebagai dampak lanjutan dari meningkatnya kemiskinan dan kesengsaraan rakyat,

7. Terancamnya kesatuan nasional sebagai dampak lanjutan dari ketidakmerataan dan ketidakadilan distribusi ekonomi, dan
8. Demokrsai dilanggar dimana hanya segelintir orang tertentu yang mengatur kebijakan ekonomi dan politik.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) seperti yang dikutip oleh Didi (2015), menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai berikut:

- a. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam Laporan Keuangan untuk mengelabui pemakai Laporan Keuangan.
- b. Salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebutkan dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat Laporan Keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku Umum di Indonesia atau GAAP (*General Accepted Accounting Prinsiples*).

Menurut *the Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), Internal Fraud (tindakan penyelewengan didalam perusahaan atau institusi) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: (1) penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), (2) pernyataan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah (*fraudulent statement*), dan (3) korupsi (*corruption*) (Fitrawansyah 2014:9). ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 2 kelompok, yaitu :

- 1) Konflik kepentingan (*conflict of interest*) : ini merupakan benturan kepentingan.
- 2) Menyuiap atau menerima suap, Imbal-Balik (*briberies and excoiation*)-Suap, apapun jenisnya dan kepada siapapun, adalah tindakan fraud. Menyuiap dan menerima suap, merupakan tindakan fraud. Tindakan lain yang masuk dalam kelompok fraud ini adalah: menerima komisi, membocorkan rahasiyah perusahaan (baik berupa data atau dokumen) apapun bentuknya, kolusi dalam tender tertentu.

Di Indonesia sendiri *fraud* khususnya korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara dalam perspektif hukum yaitu Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, korupsi dapat dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis Tindak Pidana Korupsi (Ardisasmita, 2006:4). Ketigapuluh bentuk/jenis Tindak Pidana

tersebut, pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam tujuh tindak pidana pokok. Ketujuh tindak pidana pokok menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terdiri atas: (1) kerugian keuangan negara, (2) suap-menyuiap, (3) penggelapan dalam jabatan, (4) pemerasan, (5) berbuat curang, (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi. Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan, dikenal pula tindak pidana turunan. Tindak pidana turunan merupakan tindakan yang dapat dikenakan kepada pihak ketiga berkenaan tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang. Jenis/bentuk korupsi tersebut terdiri atas: (1) merintangikan proses pemeriksaan perkara korupsi, (2) tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, (3) bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, (4) saksi atau saksi ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, (5) orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan atau memberkan keterangan palsu, dan (6) saksi yang membuka identitas pelapor.

Pristiyanti (2012) semua jenis fraud dapat terjadi pada sektor pemerintahan, akan tetapi yang paling sering terjadi adalah korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio-Corumpere* yang artinya busuk, rusak, mengenyahkan, memutarbalik atau menyogok. Secara harfiah korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi ataupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. *Fraud* pada sektor pemerintahan merupakan *fraud* yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Dalam sistem pemerintahan kita penyelenggara negara terdiri atas orang-orang yang berada pada level eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Mahmudi (2011:2) Organisasi sektor publik merupakan organisasi dalam bidang pelayanan publik dan penyelenggara negara dalam pelaksanaan konsitusi negara. Organisasi sektor publik terdiri atas: pemerintahan (baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota), perusahaan negara (Persero/Perum), dan lembaga *non profit* milik negara (MPR,DPR,lembagakehakiman, lembaga

kejaksaan, dan sebagainya). Pristiyanti (2012:2) mengatakan semua jenis *fraud* dapat terjadi pada semua Sektor Pemerintahan, akan tetapi yang paling sering terjadi adalah korupsi. Pemerintah melalui Inpres (intruksi presiden) No. 17 Tahun 2011 telah menetapkan 10 area rawan terjadinya TPK, yaitu: (1) pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBN/APBD, (2) keuangan dan perbankan, (3) perpajakan, (4) minyak dan gas (migas), (5) BUMN dan BUMD, (6) kepabeanaan dan cukai, (7) penggunaan APBN/APBD, (8) aset negara dan daerah, (9) pertambangan dan pekerjaan, dan (10) pelayanan umum. Berbeda dengan karakteristik korupsi yang terjadi pada organisasi publik yang ada di pusat yang lebih pada penyalahgunaan kewenangan (*abuse authority*) berhubungan dengan jabatan (*white collar crimes*) karakteristik korupsi yang terjadi di daerah (provinsi dan kota/kabupaten) lebih kepada penyimpangan pengelolaan APBD. Menurut laporan Bank Dunia/*World Bank* (Rinaldi, *et al.*, 2007:VI) ada beberapa modus operandi korupsi yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif daerah. Modus operandi tersebut antara lain:

- a. Dilakukan oleh eksekutif : (a) penggunaan sisa dana tanpa prosedur, (b) penyimpangan prosedur penjualan dan pencairan kas daerah, (c) sisa APBD, dan (d) manipulasi dalam proses pengadaan.
- b. Dilakukan oleh legislatif : (a) memperbanyak dan memperbesar mata anggaran, (b) menyalurkan dana APBD ke lembaga atau yayasan fiktif, dan (c) manipulasi perjalanan dinas.

Kasus korupsi yang terjadi di daerah apabila dilihat dari perspektif pendapatan dan pengeluaran daerah sebagai area kerja BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dapat dijabarkan sebagai berikut, dari segi penerimaan terdiri atas: (a) rendahnya anggaran penerimaan pajak, PBB, bea cukai, retribusi, dan pajak lainnya jika dibandingkan dengan potensi yang tersedia, (b) manipulasi restitusi pajak, (c) laporan SPT pajak bulanan dan tahunan yang tidak sesuai dengan potensi yang sesungguhnya, (d) kesalahan pengenaan tarif pajak maupun bea, (e) pembebasan pajak atau bahan baku impor tujuan ekspor tidak sesuai dengan data sesungguhnya, (f) perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah memperkecil data volume produksi pertambangan atau hasil alam, (g) memperbesar *cost recovery*, sehingga

setoran hasil menjadi berkurang, (h) kontrak pembagian hasil tambang yang merugikan negara, (i) penjualan aset pemerintah tidak berdasarkan harga wajar atau harga pasar, (j) pelaksanaan tukar guling (*ruislaag*) yang merugikan negara dan pemanfaatan tanah negara yang harga sewanya tidak wajar, dan (k) penerimaan yang seharusnya masuk ke rekening kas negara, namun masuk ke rekening atas nama pejabat atau perorangan, meskipun pejabat tersebut pimpinan instansi yang bersangkutan namun cara ini berpotensi merugikan keuangan negara. Sedangkan, dari segi pengeluaran terdiri atas: (a) pengeluaran belanja barang/jasa atau perjalanan dinas fiktif, (b) pembayaran ganda pejabat atau pegawai yang diperbantukan, (c) penggelembungan (*mark up*) harga, atau harga patokan terlalu mahal dibandingkan harga pasar, (d) pelaksanaan sistem tender, penunjukan rekanan dan atau konsultan, persyaratan kualifikasi dan lain-lain tidak sesuai standar prosedur, atau sesuai prosedur tetapi hanya memenuhi syarat formalitas, (e) pemenang tender mensubkontrakan pekerjaannya kepada pihak ketiga, sehingga posisi rekanan bertindak sebagai *broker*, (f) rekanan atau konsultan tidak mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan, (g) pekerjaan atau barang yang dihasilkan tidak sesuai spesifikasi, (h) program batuan sosial dan batuan bencana yang salah sasaran, (i) adanya percaloan dalam pengurusan alokasi dana, (j) biaya yang terlalu tinggi pada penunjukan konsultan keuangan, akuntan, *underwriter*, dan penggunaan tenaga profesional lainnya terkait dengan program pemerintah atau BUMD, (k) privatisasi BUMD yang merugikan negara, dan (l) biaya restrukturisasi, bantuann likuiditas dan biaya-biaya lain yang merugikan negara (BPKP, 2004 dalam Najahningrum, 2013).

Agency theory atau teori keagenan dikembangkan pertama kali oleh Jansen dan Meckling (1976). *Agency theory* menggambarkan kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal (*owner*) sebagai *principal* membangun suatu kontrak kerja sama yang disebut dengan "*nexus of conduct*", kontrak kerja sama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberikan

kepuasan yang maksimal seperti *profit* yang tinggi kepada pemilik modal (*owner*). Dalam hubungan keagenan tersebut, memungkinkan terjadinya sikap oportunistik (*opportunistic behavior*) di kalangan manajemen perusahaan dalam melakukan beberapa tindakan yang sifatnya disengaja seperti:

1. Melaporkan piutang tak tertagih (*bad debt*) yang lebih besar dari kenyataan yang sesungguhnya.
2. Melaporkan hasil penjualan dengan peningkatan yang tidak terlalu tinggi.
3. Melaporkan kepada pihak prinsipal bahwa dibutuhkan dana tambahan untuk menunjang pelaksanaan proyek yang sedang dikerjakan jika tidak dibantu maka proyek akan terhenti.
4. Membuat laporan keuangan ganda, yaitu laporan keuangan yang datanya diotak-atik (*window dressing*) atau sudah dirubah untuk tujuan tertentu diberikan kepada pihak komisaris perusahaan namun yang sebenarnya hanya diketahui oleh para petinggi di manajemen perusahaan.

Menurut Jansen dan Meckling (1976), untuk mengeleminasi kondisi-kondisi tersebut dibutuhkan biaya keagenan (*agency cost*). Jansen dan Meckling (1976), *agency cost* terdiri atas:

1. *The monitoring expenditure by the principle.* Biaya *monitoring* yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan (*control*) perilaku agen melalui *budget restriction*, dan *compensation policies*.
2. *The bonding expenditure by the agen.* *The bonding cost* dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau menjamin bahwa prinsipal akan diberikan kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan.
3. *The residual loss* yang merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal ataupun agen setelah adanya *agen relationship*.

Teori *fraud triangle* atau segitiga kecurangan, pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Cressey (1953). Konsep dari teori *fraud triangle* digunakan secara luas dalam praktek akuntan publik pada *Statement of Auditing Standar (SAS) No. 99, Consideration of Fraud in a Financial Statement Auditing* yang menggantikan SAS No. 82. Konsep ini

bertumpu pada riset Cressey terhadap narapidana *fraud* di Amerika. Pada penelitiannya Cressey tertarik pada *embezzlers* yang disebutnya "*trust violators*" atau "pelanggar kepercayaan" yakni mereka yang melanggar kepercayaan atau amanah yang ditipkan kepada mereka. Secara khusus teori ini mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan pelaku *fraud* menyerah kepada godaan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menyertakan mereka yang mencari kerja untuk tujuan mencuri. Atau dengan kata lain, yang menjadi obyek Cressey adalah pelaku *fraud* yang memiliki kredibilitas dan integritas pada waktu ia bekerja pada perusahaan. Cressey mengemukakan 3 faktor yang menyebabkan orang melakukan *fraud*, yaitu (1) insentif atau tekanan melakukan *fraud* (*pressure*), (2) peluang atau kesempatan untuk melakukan *fraud* (*opportunity*), dan (3) dalih untuk membenarkan tindakan *fraud* (*rationalization*).

Montgomery et al., (2002) kesempatan yaitu peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa menjalankan aksinya yang disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah, ketidakdisiplinan, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit, dan sikap apatis. Para pelaku *fraud* percaya bahwa aktifitas mereka tidak akan terdeteksi. Pada dasarnya ada 2 faktor yang dapat meningkatkan adanya peluang atau kesempatan bagi seseorang untuk berbuat *fraud*, yaitu:

1. Sistem pengendalian intern yang lemah, misalnya kurang atau tidak ada *audit trail* (jejak audit) sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran, ketidakcukupan, dan ketidakefektifan aktivitas pengendalian pada area dan proses bisnis yang berisiko, sistem dan kompensasi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak mengimbangi kompleksitas organisasi, kebijakan, dan prosedur SDM yang kurang kondusif. Termasuk ketidakefektifan pengendalian adalah adanya kepercayaan yang berlebih yang diterima pelaku *fraud* dari atasan atau pemilik perusahaan atau atasan tidak disiplin dalam menjalankan pengawasan.
2. Tata kelola organisasi buruk seperti tidak ada komitmen yang tinggi dan suri tauladan yang baik dari lapisan manajemen, sikap manajemen yang lalai, apatis, atau acuh tak acuh dan gagal

mendisplinkan atau memberikan sanksi pada pelaku *fraud* atau pembiaran terhadap pelaku tidak etis atau *fraud*, tidak mampu menilai kualitas kerja karena tidak punya alat atau kriteria pengukuran, pengawasan dewan komisaris atau komite audit tidak berjalan semestinya atau tidak independensi atau objektif, kode etik, regulasi, standar prosedur internal ada namun hanya hiasan.

Dari tiga elemen *fraud triangle*, peluang untuk mengendalikan *fraud* terbesar adalah *opportunity*. Organisasi seharusnya peduli dan turut serta untuk membangun sebuah proses, prosedur dan kontrol serta tata kelola yang membuat semua personil dalam organisasi tidak memiliki kesempatan melakukan *fraud* dan yang lebih penting dapat mendeteksi *fraud* jika hal itu terjadi. Namun, *opportunity* sangat berkaitan dengan integritas seseorang. Jika karyawan dalam perusahaan memiliki integritas yang rendah dan perusahaan tidak menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang kuat sehingga memunculkan kesempatan melakukan *fraud* maka resiko terjadinya *fraud* dalam perusahaan tersebut akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya.

Norbarani (2012) rasionalisasi merupakan sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang memperbolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan *fraud*. *Rationalization* terjadi karena pelaku *fraud* mencari pembenaran atas aktivitas yang mengandung *fraud*. Para pelaku *fraud* meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu *fraud* tetapi adalah merupakan sesuatu hal yang menjadi haknya. Albrecht (2004) menyatakan bahwa 5 faktor integritas personal dalam fraud scale mengacu kepada kode etik personal yang dimiliki oleh tiap individu. Studi dari Albrecht ini memperkuat studi Cressey sebelumnya. Albrecht mengganti faktor rationalization dengan personal integrity agar lebih dapat diobservasi. Personal integrity mengacu kepada kode etik personal yang dimiliki individu. Personal integrity dapat diobservasi lewat teori perkembangan moral seperti dalam penelitian-penelitian etika. Ramamoorti (2008) menyatakan bahwa rasionalisasi dan tekanan adalah faktor faktor penyebab

kecurangan akuntansi yang didasari oleh kondisi psikologis pelaku. Dorminey et al. (2011) menyatakan bahwa faktor rasionalisasi dan tekanan merupakan karakteristik pelaku kecurangan akuntansi yang tidak dapat diobservasi karena mustahil untuk mengetahui apa yang dipikirkan oleh pelaku ketika akan melakukan kecurangan akuntansi.

Kolusi juga terjadi di berbagai bidang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu guna kepentingan mereka bersama. Kolusi merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara membuat kesepakatan tersembunyi tanpa diketahui oleh banyak pihak. Kesepakatan yang dilakukan kedua pihak dalam bentuk perjanjian tersebut biasanya diiringi dengan pemberian sejumlah uang, property, fasilitas guna pelincin supaya semua urusan menjadi lebih lancar. Tindakan ini juga bersifat melanggar hukum dengan mengorbankan segalanya demi mendapatkan keuntungan bersama. Individu yang tidak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan lain, konsumen atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh pengendalian intern (misalnya, kolusi antara tiga karyawan mulai dari departemen personel, manufaktur, dan penggajian untuk membuat pembayaran kepada karyawan fiktif) seperti yang dikemukakan Najahningrum (2013). Sedangkan pengertian kolusi berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara-negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, kolusi adalah pemufakatan kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain, masyarakat ataupun negara. Adapun Ciri-ciri kolusi yaitu sebagai berikut :

1. Pemberian uang pelincin kepada perusahaan tertentu oleh oknum pejabat atau pegawai pemerintahan agar perusahaan dapat memenangkan tender pengadaan barang dan jasa tertentu.
2. Penggunaan broker (perantara) dalam pengadaan barang dan jasa tertentu. Padahal, seharusnya dapat dilaksanakan melalui mekanisme *governance to governance* (pemerintah ke pemerintah) atau *governance to produsen* (pemerintah ke produsen), atau dengan kata lain secara langsung.

Factor-faktor penyebab terjadinya Kolusi dalam berbagai ruang lingkup:

1. Dalam masyarakat: Himpitan ekonomi, seperti gaji lebih kecil dari kebutuhan yang makin meningkat, latar belakang kebudayaan atau kultur kerja atau lingkungan tempat tinggal.
2. Dalam pemerintahan: Monopoli Kekuasaan dengan wewenang pejabat yang absolut tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban, hubungan personal antara pemimpin dan bawahan yang tidak berdasarkan asas persamaan, tidak ada sistem kontrol yang baik, korupsi bagian budaya pejabat local.

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh *Rationalization* terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)

Rasionalisasi adalah pembenaran dari perilaku penipuan karena kurangnya karyawan dari integritas pribadi, atau penalaran moral (Rae dan Subramanian, 2008) dalam Abdullah, Mansor (2015). Konsep ini menunjukkan bahwa pelaku harus merumuskan beberapa ide yang dapat diterima secara moral kepadanya sebelum terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Rasionalisasi mengacu pada pembenaran dan alasan bahwa perilaku tidak bermoral yang berbeda dari kegiatan kriminal. Jika individu tidak dapat membenarkan tindakan tidak jujur, tidak mungkin bahwa ia akan terlibat dalam penipuan. Beberapa contoh rasionalisasi perilaku penipuan termasuk "Saya hanya meminjam uang", "Saya berhak atas uang karena majikan saya adalah kecurangan saya. "Selain itu, beberapa alasan penipu aksi mereka sebagai" Aku harus mencuri untuk menyediakan untuk keluarga saya "," beberapa orang melakukannya mengapa tidak aku juga "(Cressey, 1953) dalam Abdullah, Mansor (2015).

Ha : Diduga *opportunity* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

2. Pengaruh Kesempatan (*Opportunity*) terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan terjadinya *fraud*. Abdulloh, Mansor (2015) Peluang diciptakan oleh kontrol efektif atau sistem pemerintahan yang memungkinkan seorang individu untuk

melakukan kecurangan. Sifat kesempatan dirasakan bahwa kesempatan tidak harus nyata juga. Namun, peluang yang ada dalam persepsi dan keyakinan dari pelaku. Dalam kebanyakan kasus, semakin rendah resiko tertangkap, semakin besar kemungkinan itu adalah bahwa penipuan akan berlangsung. Abdullah, Mansor (2015) menyatakan kesempatan memiliki dua aspek: (i) yang melekat kerentanan organisasi untuk manipulasi, dan (ii) kondisi organisasi yang dapat menjamin penipuan terjadi. Sebagai contoh, jika ada pembagian kerja yang tidak memadai, pengendalian internal yang lemah, pemeriksaan tidak teratur, dan sejenisnya, maka kondisi akan menguntungkan bagi karyawan untuk melakukan kecurangan Sehingga saat memang peluang/kesempatan itu sangat tinggi maka tinggi pula terjadi kecurangan (*fraud*).

Ha : Diduga *rationalization* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*frud*).

3. Pengaruh *Collusion* terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Misalnya adanya kesepakatan antaran atasan dengan bawahan untuk melakukan pencurian sejumlah uang, hal ini menyebabkan tingginya potensi untuk terjadinya kecurangan. Jadi bisa di bilang saat kolusi itu sangat kuat, maka potensi terjadinya kecurangan akan sangat tinggi.

Ha : Diduga *collusion* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan objek PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berdinasi di 14 Dinas di Kota Bogor. Desain penelitian (*research design*) adalah suatu rencana kerja terstruktur dan komprehensif mengenai hubungan-hubungan antar variabel yang disusun sedemikian rupa agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset (Umar, 2002:36). Selanjutnya, Malhotra (2004) dalam Lianasari (2009:32) mendefinisikan desain penelitian sebagai kerangka atau cetak biru (*blue print*) dalam

melaksanakan suatu proyek riset, di mana didalamnya terperinci prosedur-prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menstruktur atau memecahkan masalah-masalah penelitian.

Supardi (2014) Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini dapat digolongkan non *probability sampling* dengan teknik *sampling* kuota. *Non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2016). Yang termasuk salah satu jenis teknik ini adalah *sampling* kuota. *Sampling* kuota merupakan teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiyono, 2016). Ukuran sampel yang direncanakan dalam penelitian ini adalah 84 responden. Jumlah responden tersebut terdiri atas: pejabat struktural seperti kepala dan sekretaris, serta PNS yang bekerja pada bagian atau sub bagian keuangan, perbendaharaan dan verifikasi. Data jumlah PNS diperoleh dari badan kepegawaian dan pelatihan Kota Bogor.

Metode Pengujian Data

1. Uji Validitas

Sugiyono (2016:121), valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur atau kuesioner mengukur apa yang akan diukur. Asumsi pokok dari uji validitas ini adalah setiap pertanyaan/ Pernyataan berkaitan satu dengan yang lainnya, dan juga berhubungan dengan objek yang akan diteliti.

2. Uji Reliabilitas

Sugiyono (2016:121), instrument yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Pengujian realibilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan rumus alpha. Nilai r_{hitung} dibandingkan dengan r_{tabel} , jika r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} maka dapat dinyatakan bahwa kuesioner tersebut reliabel.

Metode Analisis Data

Sugiyono (2016:147), Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variable dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variable dari seluruh responden, menyajikan data tiap variable yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

1. Analisis Statistik Deskriptif (*Descriptive Statistic*)

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016).

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian, yaitu: *opportunity*, *Rationalization*, *collusion* dan kecenderungan kecurangan akuntansi. Variabel-variabel tersebut akan diukur kinerjanya berdasarkan kriteria yang ditentukan pada masing-masing rentang skala. Menentukan rentang skala suatu aspek kinerja dilakukan analisis rentang kriteria (Umar, 2009). Analisis ini digunakan untuk mengetahui pada rentang skala manakah keputusan yang dihasilkan.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengetahui hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, X_3) dengan variabel dependen (Y). Dalam uji regresi berganda, seluruh variabel prediktor (bebas) dimasukkan ke dalam perhitungan regresi secara serentak.

3. Uji asumsi klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah model regresivariabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini dilakukan dua uji normalitas, yaitu: metode grafik dan metode *One Sample Kolmogorov Smirnov*.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menunjukkan adanya hubungan linear antara

variabel independen. Jika terdapat multikolinearitas sempurna maka akan berakibat koefisien regresi tak hingga, maka penaksiran lewat kuadran terkecil menjadi tak tertentu dan variansi serta standar deviasi menjadi tidak terdefiniskan. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan nilai *Varian Inflation Factor* (VIF).

Heterokedastitas

Asumsi pokok dari model regresi linear klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) yang muncul dalam regresi adalah heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Bila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka akan terjadi homoskedastisitas yaitu variansi variabel independen adalah konstan untuk setiap nilai tertentu variabel independen. Sebaliknya, apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, berarti terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, akan dilakukan dua uji heteroskedastisitas, yaitu *Metode Scatterplots Regresi* dan *Metode Glejser*.

Metode Pengujian Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau uji koefisien regresi secara serentak digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, *opportunity* (X_1), *Rationalization* (X_2), *collusion* (X_3) dan benar-benar berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen kecenderungan kecurangan (Y).

2. Uji t (Uji Parsial)

Uji t atau uji parsial digunakan untuk menguji berarti atau tidaknya hubungan variabel-variabel independen yang terdiri dari: *opportunity* (X_1), *Rationalization* (X_2), *collusion* (X_3).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Hasil Sebaran responden berdasarkan usianya, yang terdiri atas: usia 21 sampai 30 tahun, 31 sampai 40 tahun, 41 sampai 50 tahun, dan diatas 50 tahun. Persentase sebaran responden berdasarkan usia terdiri atas: usia 21 sampai 30 tahun sebanyak 8 responden

(15%), 31 sampai 40 tahun sebanyak 26 responden (48%), 41 sampai 50 tahun sebanyak 16 responden (30%), dan diatas 50 tahun sebanyak 4 responden (7%). Sebaran responden berdasarkan jabatannya, yang terdiri atas: Kasubbag keuangan dan Staff keuangan. Persentase sebaran responden berdasarkan jabatannya terdiri atas : Kasubbag Keuangan sebanyak 12 responden (22%) dan Staff Keuangan 42 responden (78%). Sebaran responden berdasarkan masa kerjanya, yang terdiri atas : 1 sampai 10 tahun, 11 sampai 20 tahun, 21 sampai 30 tahun, dan diatas 31 tahun. Persentase sebaran responden berdasarkan masa kerjanya terdiri atas: 1 sampai 10 tahun sebanyak 20 responden (37%), 11 sampai 20 tahun sebanyak 22 responden (41%), 21 sampai 30 tahun sebanyak 12 responden (22%), dan diatas 31 tahun tidak ada (0%). Sebaran responden berdasarkan masa kerjanya, yang terdiri atas: SMA/Sederajat, Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Sarjana, dan Pascasarjana. Persentase sebaran responden berdasarkan pendidikan terakhirnya terdiri atas: SMA/Sederajat sebanyak 12 responden (22%), Diploma 1 sebesar 1 responden (2%), Diploma 2 tidak ada (0%), Diploma 3 sebanyak 8 responden (15%), Sarjana sebanyak 24 responden (44%), dan Pascasarjana 9 responden (17%).

Uji Validitas Instrumen

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan memiliki validitas di atas 0,2262 dengan taraf signifikansi semua item pertanyaan mencapai 0,000. Untuk variabel endogen *Opportunity* diukur dengan 11 item pertanyaan memiliki nilai *pearson coleration* tertinggi 0,863 pada item pertanyaan ke 3 (O3) dan nilai *pearson coleration* terendah 0,677 pada item pertanyaan ke 10 (O10). Dengan demikian semua item pernyataan *Opportunity* lolos uji validitas. Variabel endogen *Rationalization* diukur dengan 11 item pertanyaan memiliki nilai *pearson coleration* tertinggi 0,905 pada item pertanyaan ke 5 (R5) dan nilai *pearson coleration* terendah 0,685 pada item pertanyaan ke 1 (R1). Dengan demikian semua item pernyataan *Rationalization* lolos uji validitas. variabel endogen *Collusion* diukur dengan 9 item pertanyaan memiliki nilai *pearson coleration* tertinggi 0,912 item pertanyaan ke 8 dan 9 (C8 & C9) dan nilai

pearson coleration terendah 0,689 pada item pertanyaan ke 5 (C5). Dengan demikian semua item pernyataan *Collusion* lolos uji validitas.

Variabel eksogen *Fraud* diukur dengan 6 pada item pertanyaan memiliki nilai *pearson coleration* tertinggi 0,984 item pertanyaan ke 2

Berikut hasil pengujian reliabilitas ditunjukkan dengan tabel 4.4 dibawah ini :

dan ke 3 (F2 & F3) dan nilai *pearson coleration* terendah 0,925 pada item pertanyaan ke 6 (F6). Dengan demikian semua item pernyataan *Fraud* lolos uji validitas.

Uji Reliabilitas Instrumen

Tabel 1: Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

| Variabel | Nilai Cronbach's alpha | Status Menurut George dan Maller |
|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <i>Opportunity</i> | 0,940 | Sempurna (<i>Excellent</i>) |
| <i>Rationalization</i> | 0,963 | Sempurna (<i>Excellent</i>) |
| <i>Collusion</i> | 0,950 | Sempurna (<i>Excellent</i>) |
| <i>Fraud</i> | 0,984 | Sempurna (<i>Excellent</i>) |

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 1. dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan reliabel atau memiliki kehandalan jika pengukuran diulang. Hal ini dibuktikan dengan semua variabel yang memiliki predikat sempurna (*excellent*).

Hasil pengolahan data variable *Opportunity* menunjukkan bahwa standar deviasi sebesar 7,6175393 lebih kecil dari mean yang sebesar 41,537037. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sampel dominan berkumpul disekitar rata-rata hitungnyanya. Hal ini dapat dikatakan *opportunity* masuk kedalam kategori berkesempatan.

Analisa Deskripsi Variabel Penelitian

Tabel 2: Distribusi Kategori Penilaian Responden Untuk Variabel *Opportunity*

| No. | Interval | Kategori | Jumlah Responden | Persentase |
|-----|-------------|----------------------------|------------------|------------|
| 1 | 11,0 – 19,8 | Sangat Tidak berkesempatan | 0 | 0% |
| 2 | 19,8 – 28,6 | Tidak Berkesempatan | 5 | 9% |
| 3 | 28,6 – 37,4 | Cukup Berkesempatan | 6 | 11% |
| 4 | 37,4 – 46,2 | Berkesempatan | 35 | 65% |
| 5 | 46,2 – 55,0 | Sangat Berkesempatan | 8 | 15% |

Sumber: Data dan Informasi Diolah (2016)

Berdasarkan tabel 2. menunjukkan sebagian besar responden menyatakan pendapat pada kategori berkesempatan yaitu sebanyak 35 responden. Hasil ini menunjukkan kesempatan untuk melakukan kecurangan yang bisa saja terjadi di masing-masing dinas se-Kota Bogor.

Hasil pengolahan data Variabel *Rationalization*, menunjukkan bahwa standar

deviasi sebesar 9,8127116 lebih kecil dari mean yang sebesar 29,555556. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sampel dominan berkumpul disekitar rata-rata hitungnyanya. Hasil ini menunjukkan dapat dikatakan *Rationalization* masuk kedalam kategori cukup dibenarkan.

Tabel 3: Distribusi Kategori Penilaian Responden Untuk Variabel *Rationalization*

| No. | Interval | Kategori | Jumlah Responden | Persentase |
|-----|-------------|-------------------------|------------------|------------|
| 1 | 11,0 – 19,8 | Sangat Tidak Dibenarkan | 4 | 7% |
| 2 | 19,8 – 28,6 | Tidak Dibenarkan | 26 | 48% |
| 3 | 28,6 – 37,4 | Cukup Dibenarkan | 11 | 20% |
| 4 | 37,4 – 46,2 | Dibenarkan | 12 | 22% |
| 5 | 46,2 – 55,0 | Sangat Dibenarkan | 1 | 3% |

Sumber : Data Primer Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 3. menunjukkan sebagian besar responden menyatakan pendapat pada kategori tidak dibenarkan yaitu

sebanyak 26 responden. Hal ini menunjukkan bahwa menurut persepsi pegawai dinas se-

Kota Bogor tidak benarkannya suatu ungkapan membenaran untuk melakukan kecurangan.

Hasil pengolahan data Variabel *Collusion*, menunjukkan bahwa standar deviasi sebesar 6,7713995 lebih kecil dari mean yang sebesar

29,814815. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sampel dominan berkumpul disekitar rata-rata hitungnya. Hasil ini menunjukkan bahwa dapat dikatakan *Collusion* masuk kedalam kategori kadang-kadang berkolusi .

Tabel 4: Distribusi Kategori Penilaian Responden Untuk Variabel *Collusion*

| No. | Interval | Kategori | Jumlah Responden | Persentase |
|-----|-------------|---------------------------|------------------|------------|
| 1 | 9,0 – 16,2 | Tidak Pernah Berkolusi | 0 | 0% |
| 2 | 16,2 – 23,4 | Tidak Berkolusi | 10 | 19% |
| 3 | 23,4 – 30,6 | Kadang – kadang Berkolusi | 13 | 24% |
| 4 | 30,6 – 37,8 | Berkolusi | 28 | 52% |
| 5 | 37,8 – 45,0 | Sering Berkolusi | 3 | 5% |

Sumber : Data Primer Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 4. menunjukkan sebagian besar responden menyatakan pendapat pada kategori berkolusi yaitu sebanyak 28 responden. Hal ini menunjukkan bahwa menurut persepsi pegawai dinas se-Kota Bogor ada kemungkinan melakukan kerjasama (kolusi) dalam melakukan kecurangan.

Hasil pengolahan data Variabel *Fraud*, menunjukkan bahwa standar deviasi sebesar 3,9640682 lebih kecil dari mean yang sebesar 23,055556. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sampel dominan berkumpul disekitar rata-rata hitungnya. Hasil ini menunjukkan bahwa maka dapat dikatakan *Fraud* masuk kedalam kategori sering terjadi.

Tabel 5 : Distribusi Kategori Penilaian Responden Untuk Variabel *Fraud*

| No. | Interval | Kategori | Jumlah Responden | Persentase |
|-----|-------------|-----------------------|------------------|------------|
| 1 | 6,0 – 10,8 | Sangat Jarang Terjadi | 0 | 6% |
| 2 | 10,8 – 15,6 | Jarang Terjadi | 5 | 9% |
| 3 | 15,6 – 20,4 | Kadang-kadang Terjadi | 1 | 2% |
| 4 | 20,4 – 25,2 | Sering Terjadi | 43 | 80% |
| 5 | 25,2 - 30,0 | Sangat Sering Terjadi | 5 | 9% |

Sumber : Data Primer Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 5. menunjukkan sebagian besar responden menyatakan pendapat pada kategori sering terjadi yaitu sebanyak 43 responden. Hal ini menunjukkan bahwa menurut persepsi pegawai dinas se-Kota Bogor kecenderungan kecurangan sering terjadi.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas dengan metode *one sample kolmogrov smirnov* pada penelitian ini ditunjukkan dengan Tabel di bawah ini:

Tabel 6 : Hasil Uji Normalitas dengan *One Sampel Kolmogrov Smirnov Test*

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 54 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 0 |
| | Std. Deviation | 1,9261852 |
| Most Extreme Differences | Absolute | 0,096 |
| | Positive | 0,096 |
| | Negative | -0,063 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 0,705 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | 0,702 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Primer Diolah 2017

Berdasarkan Tabel 6. dapat dilihat nilai signifikan atau *asympt.sig.* untuk uji 2 arah adalah 0,702 atau lebih besar dari 0,05 (0,702 > 0,05). Dengan demikian dapat dikatakan model regresi berdistribusi normal.

Hasil pengujian multikolinearitas dengan metode VIF pada penelitian ini, ditunjukkan dengan Tabel di bawah ini:

Tabel 7 : Hasil Uji Multikolinearitas Dengan Metode VIF

| Model | | Collinearity Statistics | |
|-------|------------------------|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | <i>Opportunity</i> | 0,654 | 1,530 |
| | <i>Rationalization</i> | 0,767 | 1,304 |
| | <i>Collusion</i> | 0,550 | 1,819 |

a. Dependent Variable: Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)

Berdasarkan Tabel 7. dapat dilihat bahwa ketiga variabel bebas memiliki nilai VIF yang masing-masing adalah variabel *Opportunity* sebesar 1,530, variabel *rationalization* sebesar 1,304 dan variabel *collusion* sebesar 1,819. Ketiga variabel memiliki nilai VIF lebih kecil dari 5 (VIF<5), maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas atau non multikolinieritas.

Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Kreteria pengambilan keputusan diambil, jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji Glejser pada penelitian ini ditunjukkan dengan Tabel di bawah ini:

Tabel 8: Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | T | Sig. |
| 1 | (Constant) | 2,409 | ,924 | | 2,608 | ,012 |
| | X1 | ,002 | ,026 | ,015 | ,090 | ,929 |
| | X2 | ,002 | ,018 | ,018 | ,114 | ,910 |
| | X3 | -,035 | ,032 | -,205 | -1,095 | ,279 |

Sumber : Data Primer Diolah 2017

Berdasarkan hasil uji Glesjer pada Tabel 8. di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi ketiga variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah 2 variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai

prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *test for linearity* dengan pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (*linearity*) kurang dari 0,05. Hasil uji linearitas dari ketiga variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini ditunjukkan dengan Tabel di bawah ini:

Tabel 9: Hasil Uji Linearitas

| Variabel Independen | Nilai Signifikansi of linearity |
|------------------------|---------------------------------|
| <i>Opportunity</i> | 0,000 |
| <i>Rationalization</i> | 0,012 |
| <i>Collusion</i> | 0,000 |

Sumber : Data Primer Diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 9. di atas Dua variabel independen (*Opportunity* dan *Collusion*) secara individual mempunyai nilai

signifikansi linearitas (*sig. of linearity*) sebesar 0,000 dan satu variabel independen (*Rationalization*) mempunyai nilai signifikansi

lineraitas (*sig. of linearity*) sebesar 0,012 dengan variabel dependen kecenderungan kecurangan mempunyai nilai signifikansi lineraitas (*sig. of linearity*) sebesar 0,00. Dengan demikian karena nilai *sig of liniaerity* kurang dari 0,05 (*sig. of linearity* < 0,05) maka dapat dikatakan semua variabel independen mempunyai hubungan yang linear terhadap varaiebel kenderungan kecurangan.

Analisa Regresi Linear Berganda

Analisa regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari 1 variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini digunakan 3 analisa regresi linear berganda, yaitu: persamaan regresi, koefisien kolerasi, dan koefisien determinasi.

Tabel 10: Hasil Analisa Regresi Linear Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | t | Sig. |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--|-------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| 1 (Constant) | 3,494 | 1,584 | | | 2,206 | 0,032 |
| <i>Opportunity</i> | 0,387 | 0,044 | 0,744 | | 8,751 | 0,000 |
| <i>Rationalization</i> | 0,007 | 0,032 | 0,017 | | 0,218 | 0,828 |
| <i>Collusion</i> | 0,110 | 0,054 | 0,188 | | 2,027 | 0,048 |

a. Dependent Variable: Kecurangan (*Fraud*)

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Hasil pengolahan data berdasarkan tabel 10. Di atas dapat diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 3,494 + 0,387X_1 + 0,007X_2 + 0,110X_3$$

Interprestasi persamaan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 3,494 artinya jika *Opportunity*, *Rationalization*, dan *collusion* nilainya adalah 0 maka kecenderungan kecurangan sebesar 3,494 unit.
- b. Koefisien regresi variabel *Opportunity* sebesar 0,387 artinya jika variabel independen lainnya nilainya tetap dan *Opportunity* (X_1) mengalami kenaikan 1 unit, maka kecenderungan kecurangan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,387 satuan unit. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara *Opportunity* dengan kecenderungan kecurangan, semakin naik *Opportunity* semakin naik kecenderungan kecurangan.
- c. Koefisien regresi *Rationalization* sebesar 0,007 artinya jika variabel independen lainnya nilainya tetap dan *Rationalization*

(X_2) mengalami kenaikan 1 unit, maka kecenderungan kecurangan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,007 satuan unit. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara *Rationalization* dengan kecenderungan kecurangan, semakin naik *Rationalization* semakin naik kecenderungan kecurangan.

Koefisien regresi variabel *Collusion* sebesar 0,110 artinya jika variabel independen lainnya nilainya tetap dan *Collusion* (X_3) mengalami kenaikan 1 unit, maka kecenderungan kecurangan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,110 satuan unit. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara *Collusion* dengan kecenderungan kecurangan, semakin naik *Collusion* semakin naik kecenderungan kecurangan.

Koefisien Korelasi dan Determinasi

Koefisien korelasi yang dihasilkan dalam penelitian ini ditunjukan dengan Tabel 4.19 berikut ini:

Tabel 11: Hasil Analisa Korelasi Berganda

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,874 ^a | ,764 | ,750 | 1,98313 |

a. Predictors: (Constant), *opportunity*, *rationalization*, *collusion*

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 11. di atas diperoleh angka R sebesar 0,874. Setelah dilihat dengan Tabel 3.9 angka ini menunjukkan tingkat hubungan yang kuat antara variabel *Opportunity*, *Rationalization*, dan *collusion* dengan variabel kecenderungan kecurangan. Sedangkan koefisien determinasi Berdasarkan tabel 11. angka *R Square* atau koefisien determinasi adalah 0,764 (berasal dari $0,874 \times 0,874$). Hal ini berarti 76,4% variasi dari kecurangan (*fraud*) bisa dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen,

sedangkan sisanya ($100\% - 76,4\% = 23,6\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Nilai *Adjusted R Square* yang telah disesuaikan, nilai ini selalu lebih kecil dari *R Square* yang bernilai 0,750 yang artinya nilai R^2 yang disesuaikan terhadap variabel bebas yang berarti 75% variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikatnya sedangkan sisa 25% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang

tidak diteliti dalam penelitian ini. *Standard Error of the Estimate* adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksikan nilai Y. Dari hasil regresi di dapat nilai 1,98313 atau 1,98313 satuan unit, hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi kecurangan sebesar 1,98313 satuan unit.

Pengujian Hipotesis

Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (*Opportunity*, *Rationalization*, dan *collusion*) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (kecenderungan kecurangan). Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Dari hasil *output* analisa regresi dapat diketahui nilai F seperti pada tabel 4.21 berikut ini.

Tabel 12: Hasil Uji F (Uji Simultan)

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 636,193 | 3 | 212,064 | 53,922 | ,000 ^b |
| | Residual | 196,640 | 50 | 3,933 | | |
| | Total | 832,833 | 53 | | | |

a. Dependent Variable: Kecurangan (*Fraud*)

b. Predictors: (Constant), *opportunity*, *rationalization*, *collusion*

Sumber : *Data Primer Diolah (2017)*

Berdasarkan Tabel 12. hasil pengolahan data menunjukkan ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hal ini ditunjukkan dengan t_{hitung} sebesar 53,922 lebih besar dari t_{tabel} 2,79 dan probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan pengolahan data tersebut, dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara *opportunity*, *rationalization*, dan *collusion* dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*), sehingga ketiga variabel tersebut secara simultan dapat memicu terjadinya kecurangan (*fraud*). Dengan demikian hipotesis mayor (H_4) dapat diterima.

Hal tersebut konsisten dengan teori *fraud triangle* yang membagi faktor-faktor penyebab *fraud* ke dalam tiga dimensi. Adapun dua dimensi yang digunakan dalam penelitian

ini terdiri dari dimensi *opportunity* dan dimensi *rationalization*, serta adanya kolusi (kongkalikong). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dimensi *fraud triangle theory* yang diikuti dengan adanya kolusi dalam suatu instansi, maka semakin tinggi kecurangan yang mungkin terjadi.

Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (*opportunity*, *rationalization*, dan *collusion*) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kecenderungan kecurangan). Hasil analisis regresi *output* SPSS ditunjukkan dengan Tabel 4.22 berikut ini:

Tabel 13: Hasil Uji t (Uji Parsial)
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | T | Sig. |
|-----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| 1 (Constant) | 3,494 | 1,584 | | | 2,206 | ,032 |
| Opportunity | ,387 | ,044 | ,744 | | 8,751 | ,000 |
| Rationalization | ,007 | ,032 | ,017 | | ,218 | ,828 |
| Collusion | ,110 | ,054 | ,188 | | 2,027 | ,048 |

a. Dependent Variable: Kecurangan (*Fraud*)

Sumber : Data Primer Diolah (2017)

a. Pengujian koefisien regresi variabel Opportunity

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\%$ (uji 1 sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $54-3-1= 50$ (n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 1 sisi (signifikansi = 0,050) hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,67591. Oleh karena nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($8,751 \geq 1,67591$) maka H_0 ditolak, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara *opportunity* dengan kecenderungan kecurangan. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial *opportunity* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan.

b. Pengujian koefisien regresi variabel Rationalization

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\%$ (uji 1 sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $54-3-1= 50$ (n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 1 sisi (signifikansi = 0,050) hasil diperoleh

untuk t_{tabel} sebesar 1,67591. Oleh karena nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ ($0,218 \leq 1,67591$) maka H_0 diterima, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara *rationalization* dengan kecenderungan kecurangan. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial *rationalization* tidak berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan.

c. Pengujian koefisien regresi variabel Collusion

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\%$ (uji 1 sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $54-3-1= 50$ (n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 1 sisi (signifikansi = 0,050) hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,67591. Oleh karena nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($2,027 \geq 1,67591$) maka H_0 ditolak, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara *collusion* dengan kecenderungan kecurangan. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial *collusion* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan.

Tabel 14: Rekapitulasi Pengujian Hipotesis

| Variabel | t_{hitung} | | Kep. | Probabilitas | | |
|-------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|------|----------------|
| | t_{hitung} | t_{tabel} | | Prob. | Sig. | Kep. |
| Opportunity-> Fraud | 8,751 | 1,67591 | H_0 ditolak | 0,000 | 0,05 | H_0 ditolak |
| Rationalization-> Fraud | 0,218 | 1,67591 | H_0 diterima | 0,828 | 0,05 | H_0 diterima |
| Collusion-> Fraud | 2,027 | 1,67591 | H_0 ditolak | 0,048 | 0,05 | H_0 ditolak |

Sumber : Data Primer Diolah (2017)

a. $H_1 =$ Diduga Opportunity Berpengaruh Positif terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)

Hipotesis pertama (H_1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa *opportunity* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Dengan kata lain, semakin tinggi *opportunity* pada suatu instansi, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya

kecurangan dalam instansi tersebut. Hasil pengolahan data menunjukkan *opportunity* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hal ini ditunjukkan dengan t_{hitung} sebesar 8,751 lebih besar dari t_{tabel} 1,67951 dan probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan pengolahan data tersebut, dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara

opportunity dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*), sehingga *opportunity* dalam instansi dapat memicu terjadinya kecurangan (*fraud*). Dengan demikian hipotesis kesatu (H_1) diterima. Temuan ini sesuai dengan teori *fraud triangel* yang menjelaskan bahwa *opportunity* merupakan salah satu faktor yang menjadi motivasi terjadinya kecurangan (*fraud*). Hal ini disebabkan oleh peluang yang ada dalam persepsi dan keyakinan dari pelaku. Dalam kebanyakan kasus, semakin rendah resiko tertangkap, semakin besar kemungkinan itu adalah bahwa penipuan akan berlangsung. Dapat disimpulkan, semakin tinggi tingkat *opportunity* akan mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi.

b. H_2 = Diduga *Rationalization* Berpengaruh Positif terhadap Kecenderungan *Fraud*

Hipotesis kedua (H_2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa *rationalization* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Dengan kata lain, semakin tinggi *rationalization* (ungkapan membenaran) pada suatu instansi, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam instansi tersebut. Tetapi, hasil pengolahan data menunjukkan *rationalization* tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hal ini ditunjukkan dengan t_{hitung} sebesar 0,215 lebih kecil dari t_{tabel} 1,67951 dan probabilitas sebesar 0,828 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan pengolahan data tersebut, dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *rationalization* dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*), sehingga *rationalization* dalam instansi tidak dapat memicu terjadinya kecurangan (*fraud*). Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) ditolak. Temuan ini tidak sesuai dengan teori *fraud triangel*. Hal ini menunjukkan bahwa integritas dan moralitas individu masih sangat baik, serta perikalau etis individu yang sangat baik. Dapat disimpulkan, semakin tinggi *rationalization* tidak akan mempengaruhi kecenderungan kecurangan yang mungkin terjadi.

c. H_3 = Diduga *Collusion* Berpengaruh Positif terhadap Kecenderungan *Fraud*

Hipotesis ketiga (H_3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa *collusion* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat *collusion* pada suatu instansi, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam instansi tersebut. Hasil pengolahan data menunjukkan *collusion* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hal ini ditunjukkan dengan t_{hitung} sebesar 2,027 lebih besar dari t_{tabel} 1,67951 dan probabilitas sebesar 0,048 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan pengolahan data tersebut, dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif yang signifikan antara *collusion* dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*), sehingga tingkat *collusion* yang terdapat dalam instansi dapat menekan terjadinya kecurangan (*fraud*). Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) dapat diterima. Temuan ini sejalan dengan Sitorus (2009) yang menjelaskan bahwa *collusion* merupakan salah satu faktor lain yang menjadi motivasi terjadinya kecurangan (*fraud*). Hal ini dikarenakan dengan adanya kolusi (kongkalikong), maka semakin kuat untuk memicu terjadi kecurangan. Sehingga dapat disimpulkan, semakin tinggi tingkat *collusion* akan mempengaruhi kecenderungan kecurangan yang mungkin terjadi.

Variabel yang Paling Dominan Berpengaruh Terhadap Kecenderungan *Fraud*

Berdasarkan hasil pengolahan data variabel yang paling dominan dalam memberikan pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan ialah variabel *opportunity* dengan probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, dibandingkan dengan variabel *collusion* yang memberikan pengaruh dengan probabilitas sebesar 0,048. Sedangkan variabel *rationalization* tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dengan probabilitas sebesar 0,828. Artinya bahwa adanya peluang (*opportunity*) dalam suatu instansi sangat mendominasi atau memicu terjadi kecurangan (*fraud*). Kesempatan tersebut pada dasarnya ada 2 faktor yang dapat meningkatkan adanya

peluang atau kesempatan bagi seseorang untuk berbuat *fraud* seperti sistem pengendalian intern yang lemah, tata kelola organisasi buruk.

peluang atau kesempatan bagi seseorang untuk berbuat *fraud* seperti sistem pengendalian intern yang lemah, tata kelola organisasi buruk

KESIMPULAN

1. *Opportunity*, *rationalization* dan *collusion* secara simulatan berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* di dinas daerah Kota Bogor. Artinya semakin tinggi tingka ketiga faktor tersebut, maka akan semakin tinggi tingkat terjadinya *fraud* di Dinas Kota Bogor. Hal ini juga membuktikan bahwa teori *fraud triangle* masih relevan digunakan untuk mengidentifikasi motivasi seseorang melakukan *fraud*, serta faktor lainnya yaitu kolusi dalam memicu terjadifraud.
2. Secara parsial *opportunity* dan *collusion* berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* di Dinas Kota Bogor, sedangkan *rationalization* tidak berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* di Dinas Kota Bogor. Berpengaruhnya *opportunity* dan *collusion*, artinya semakin tingginya tingkat kesempatan dalam suatu instansi dapat menjadi sebuah motivasi untuk melakukan kecenderungan *fraud* dan semakin tingginya tingkat kolusi dalam suatu instansi dapat memicu terjadinya kecenderungan *fraud*. Hal ini disebabkan oleh peluang yang ada dalam persepsi dan keyakinan dari pelaku serta adanya monopoli kekuasaan dengan wewenang pejabat yang absolut tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban, hubungan personal antara pemimpin dan bawahan yang tidak berdasarkan asas persamaan, tidak ada sistem kontrol yang baik. Dalam kebanyakan kasus, semakin rendah resiko tertangkap, semakin besar kemungkinan itu adalah bahwa penipuan akan berlangsung.
3. Faktor yang berpengaruh dominan terhadap kecenderungan *fraud* ialah variabel *opportunity* dengan nilai beta sebesar 74,4%, dibandingkan dengan variabel *collusion* yang memberikan pengaruh dengan nilai beta sebesar 18,8%. Artinya bahwa adanya peluang (*opportunity*) dalam suatu instansi sangat mendominasi atau memicu terjadi *fraud*. Kesempatan tersebut pada dasarnya ada 2 faktor yang dapat meningkatkan adanya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mansor, 2015, *Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research*, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences (Vol 5), E-ISSN: 2225-8329, P-ISSN: 2308-0337.
- Albercht, W.S, 2004, *Fraud Examination*. USA: South-Western
- Aghghaleh, Iskandar, Mohamed, 2014, *Fraud Risk Factors of Fraud Triangle and the Likelihood of Fraud Occurrence: Evidence from Malaysia*, Information Management and Business Review.
- Ahriati, Basuki, Widiyastuti, 2015, *Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Perilaku Tidak Etis Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur*, Jurnal InFestasi (Vol 11), Halaman 41-55.
- Azwar, 2008, *Sikap Manusia, Teori Dan Pengukurannya*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Didi, 2014, *Analisa Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai OPD Kota Bogor*, Accounting Analysis Journal.
- Dorminey, J., A. S. Fleming., M.J. Kranacher, and R. A. Riley, 2011, *Beyond The Fraud Triangle, Enhancing Deterrence of Economic Crimes*, CPA Journal.
- Fahmi, Irham, 2013, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Bandung : Alfabeta
- Fitrawansyah, 2014, *Fraud & Auditing*, Edisi Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Fitria, Amilin, 2014, *Peran Integritas Personal sebagai Pemeditasi pada Pengaruh Lingkungan Etika Organisasi, Kualitas Pengendalian Internal dan Keadilan Organisasi terhadap Terjadinya Fraud*, Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (Vol

- 1), ISSN 2339 – 1545, Halaman 109 – 119.
- George, D dan Mallery, 2003, *SPSS for windows step by step: A simple Guide and reference. 11.0 Update*. Allyn and Bacon. Boston.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H, 1976, *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, *Journal of Financial Economic*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp.
- Kulsum, Umi & Jauhar, Mohammad, (2014), **Pengantar Psikologi Sosial**. Jakarta : Prestasi Pustaka
- Kumaat, Valery G., 2011, **Internal Audit**, Erlangga, Jakarta.
- Kusumastuti, Nur Ratri, 2012, **Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening**, *Accounting Analysis Journal*.
- Lianasari, Dwi, 2009, **Sumber Stress pada Karyawan Lini Depan Perbankan : Studi Kasus PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk Kantor Cabang Jakarta Pasar Minggu dan Depok**, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Depok.
- Lou, Wang, 2009, *Fraud Risk Factor Of The Fraud Triangle Assessing The Likelihood Of Fraudulent Financial Reporting*, *Journal of Business & Economic Research*.
- Mahmudi, 2011, **Akuntansi Sektor Publik**, Yogyakarta: UII Press
- Najahningrum, Anik F., 2013, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY**, *Accounting Analysis Journal*, AAJ 2 (3) (2013), ISSN 2252-6765, Halaman 259267.
- Norbarani, Listiana, 2012, **Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis Fraud Triangel yang diadopsi dalam SAS No.99**. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Puspasari, Suwardi, 2012, **Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen Pada Konteks Pemerintahan Daerah**, Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta.
- Pristiyanti, Ika R., 2012, **Persepsi Pegawai Instansi Pemerintahan Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan**, AAJ 12012, ISSN 2252-6765, Halaman 1-13.
- Ramamoorti, S, 2008, *The Psychology and Sociology of Fraud: Integrating the Behavioral Sciences Component Into Fraud and Forensic Accounting Curricula. Issues In Accounting Education Vol. 23*.
- Sitorus, 2008, *The Roles Of Collusion, Organisational Orientation, Justice Avoidance, And Rationalisation On Commission Of Fraud: A Model Based Test*, *Review of Business Research*, Vol. 8, No.1, pp. 132-147
- Supardi, 2013, **Aplikasi Statistika dalam Penelitian Konsep Statistika yang Lebih Komprehensif**, Jakarta: Change Publication.
- Sugiyono, 2016, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B**. Bandung: Alfabeta.
- Sembiring, Masana, 2011, **Budaya & Kinerja: Perspektif Organisasi Pemerintah**, Cetakan Pertama, Fokus Media, Bandung.
- Tim Penyusun KBBI, 2014, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru**, Cetakan Keenam, PT. Media Pustaka Phionex, Jakarta.
- Umar, Husein, 2002, **Metode Riset Bisnis**, PT.Gramedia, Jakarta.
- Umar, Husein, 2009, **Metode Penelitian untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Edisi kedua**, Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia, **Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia, **Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi**, Jakarta.
- Zulkarnain, Rifqi M., 2013, **Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud pada Dinas Kota Surakarta**, *Accounting Analysis Journal*, AAJ 2 (2) (2013), ISSN 2252-6765.
- Anti Coruption Clearing House, 2016, <http://acch.kpk.go.id/statistik-korsup>.

- Duggar, E. & Duggar, M, 2004, '**Corruption, culture and organizational form**'. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=770889>.
- Info Korupsi.com,2016, <http://infokorupsi.com/id/geo-korupsi.php?ac=351&l=kota-bogor>
- Kompas.com:<http://regional.kompas.com/read/2016/04/06/23173541/Kepala.Dinas.Koperasi.dan.UMKM.Kota.Bogor.Ditahan.atas.Dugaan.Korupsi>
- Liputan6.com :
<http://news.liputan6.com/read/2665472/kpk-periksa-istri-akil-mochtar-di-kasus-suap-pilkada-buton>
<http://news.liputan6.com/read/2664624/sua-p-ijon-proyek-kpk-periksa-kadisdikpora-kebumen>